	No. Alumni Universitas:	RIHANA WALDI	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang/11 April 1992 (b) Nama Orang Tua : Daswaldi ,S.H. dan Ernawati,S.H. (c) Fakultas : Hukum (d) PK : Hukum Administrasi Negara (PK VIII) (e) No.BP : 0910113308	(f) Tanggal Lulus : 21 Oktober 2015 (g) Predikat Lulus : Memuaskan (h) IPK : 3,12 (i) Lama Studi : 6tahun 5bulan (j) Alamat : Padang	


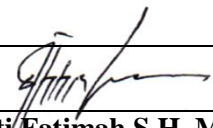
TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENYALAH IZIN TINGGAL TERBATAS DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS II BUKITTINGGI

Rihana WalDI, 0910113308, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Administrasi Negara), Halaman 58, Tahun 2015

ABSTRAK

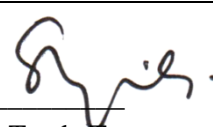
Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administratif dan diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administratif itu sendiri. Dalam Hukum Administrasi Negara penggunaan sanksi administratif merupakan penerapan kewenangan pemerintahan dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan) tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administratif sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di wilayah kantor Imigrasi Bukittinggi. Semua kendala-kendala hingga tindakan-tindakan yang dikaji pada warga Negara asing terkait dengan izin tinggal terbatas serta kemudian bagaimana kantor Imigrasi Bukittinggi dalam menyikapi dan menindak pelanggaran yang sebelumnya telah diatur oleh Undang-undang dan ketentuan terkait. Penulis menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu tindakan administratif yang dilakukan terhadap orang asing tersebut adalah dengan sanksi karantina, bayar denda, hingga deportasi. Akan tetapi Orang Asing itu juga dapat melakukan upaya hukum untuk sanksi administratif yang telah dijatuhi sebelumnya baik itu dengan gugatan ke PTUN, upaya administrative seperti keberatan dan banding administratif, namun pada kasus di Kota Bukittinggi tidak pernah sampai ketahap upaya hukum tersebut karena pada umumnya berakhir pada Deportasi. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Bukittinggi kepada Orang Asing harus terus dilakukan guna mempertegas peraturan-peraturan yang ada di Negara Indonesia khususnya pada Kota Bukittinggi baik itu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun dengan meningkatkan keamanan dari prosedur pengurusan izin tinggal terbatas.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Oktober 2015. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji		
Tanda Tangan		
Nama Terang	Gusminarti	Tit Fatimah,S.H. M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara:

Syofiarti,S.H. M.Hum.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumnus Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumnus Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

